ICSA BRIEF - Edisi 17

Pembelian Kembali Saham oleh Perusahaan Terbuka

POJK 29/2023

1 Latar Belakang Penyusunan POJK 29 Tahun 2023

POJK 29/2023 menggantikan POJK 30/2017, mengakomodasi kebutuhan akan fleksibilitas perusahaan dalam melakukan pembelian kembali saham (**buyback**), memperkuat aspek keterbukaan informasi, dan mengikuti praktik terbaik internasional. POJK ini juga memberikan pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme pengalihan saham hasil buyback (**refloat**).

2 Pokok-Pokok Pengaturan

a Kondisi Buyback

- Tanpa RUPS : Dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan (**krisis**)
- Dengan RUPS : Dalam kondisi normal
- Minimal saham beredar (*free float*): tidak boleh kurang dari 7,5% setelah buyback.

b Keterbukaan Informasi

- Disampaikan bersama pengumuman RUPS
- Jika ada perubahan, diumumkan kembali minimal 2 hari kerja sebelum RUPS
- Harus mencakup minimal informasi mengenai:
 - ▶ perkiraan jadwal;
 - ▶ penjelasan, dan alasan dilakukannya buyback;
 - ▶ pertimbangan analisis dampak keuangan;
 - ▶ sumber dana;
 - ▶ metode pelaksanaan;
 - ▶ pembatasan harga saham dan jangka waktu buyback; dan
 - ▶ pembahasan dan analisis management mengenai pengaruh buyback terhadap *going concern* Perusahaan Terbuka.
- Keterbukaan informasi jika buyback dilakukan berdasarkan Pasal 62 UUPT wajib memuat Nama pemegang saham yang sahamnya dapat dibeli kembali oleh Perusahaan Terbuka.

c **Ketentuan Sumber Dana**

- Tidak memengaruhi kemampuan keuangan Perusahaan Terbuka secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo
 - *Current ratio* >110% setelah buyback
- Menggunakan dana internal perusahaan
- Tidak boleh dari hasil penawaran umum atau pinjaman

d **Pelaksanaan Buyback**

- Wajib diselesaikan maksimal 12 bulan sejak RUPS. Jika buyback dihentikan sebelum selesainya jangka waktu 12 bulan, Perusahaan Terbuka wajib
 - ▶ menyampaikan informasi kepada OJK mengenai penghentian pembelian kembali disertai dengan alasan penghentianannya.
 - ▶ mengumumkan kepada masyarakat
- Tidak dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan buyback karena krisis
- Harga maksimal: rata-rata historis atau penilai independen (mana yang lebih rendah)

3 Pengalihan Saham Hasil Buyback (Refloat)

- Refloating wajib dilakukan dalam 3 tahun sejak buyback selesai
- Jika tidak tercapai, dapat diperpanjang hingga maksimal 6 tahun dengan kondisi tertentu dengan menyampaikan bukti pendukung ke OJK.
- Metode refloat:
 - Dijual melalui/diluar Bursa
 - Pengurangan modal
 - Program kepemilikan saham (ESOP/MSOP)
 - Pembayaran transaksi tertentu
 - Konversi efek
 - Distribusi proporsional kepada pemegang saham
 - Cara lain dengan persetujuan OJK

4 Harga Refloat

Harga penjualan saham hasil buyback dibatasi dengan ketentuan:

- Tidak lebih rendah dari rata-rata harga penutupan 90 hari
- Atau harga pasar wajar oleh penilai independen
- Diskon maksimal umumnya 7,5% (tergantung kondisi dan mekanisme)

5 Pelaporan dan Larangan

- Pelaporan berkala setiap 6 bulan: 30 Juni dan 31 Desember yang disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
- Media pengumuman: website Emiten, BEI, atau surat kabar nasional (bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek)
- Jika saham hasil buyback telah dijual pada harga yang lebih rendah dari harga buyback, Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan kerugian secara jelas dalam laporan keuangan
- Larangan untuk tidak melakukan transaksi saham pada hari buyback/refloat dilakukan oleh Perusahaan Terbuka bagi:
 - ▶ Direksi, Komisaris, Pegawai, Pemegang Saham Utama
 - ▶ Pihak dengan akses informasi orang dalam
 - ▶ Termasuk pihak yang baru berhenti dalam 6 bulan terakhir

6 Ketentuan Peralihan

- Buyback/refloat yang sudah berjalan sebelum POJK 29/2023 berlaku tetap tunduk pada POJK 30/2017 hingga selesai
- Ketentuan baru berlaku untuk aksi korporasi setelah POJK ini berlaku

7 Catatan Bagi Corporate Secretary

- Pastikan timeline keterbukaan informasi, pelaporan, dan RUPS disusun secara tepat
- Dokumentasi dan bukti keterbukaan informasi wajib tersimpan rapi
- Koordinasi erat dengan Legal, Finance, dan Investor Relations
- Monitor kewajiban pelaporan rutin dan larangan transaksi
- Evaluasi kesiapan sistem & tim untuk pemenuhan POJK ini